BerAKHLAK

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

KECAMATAN SUKOHARJO

RANHIR RENJA

2027



wonosobo
the paradise of java

Jl. Raya Sukoharjo No. 24, Wonosobo, Jawa Tengah, 56363
laman : kecamatansukoharjo.wonosobokab.go.id
Instagram : kecamatan_sukoharjowsb Telp : 0286 3302991

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan atas tersusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sukoharjo Tahun 2027. Dokumen Rencana Akhir Renja disusun sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dengan berpedoman pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027, serta memperhatikan ketentuan umum tata cara perencanaan pembangunan daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Rancangan Akhir Renja Kecamatan Sukoharjo merupakan hasil penyempurnaan atas rancangan awal dan rancangan Renja Perangkat Daerah setelah memperhatikan hasil forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, musrenbang RKPD, serta penyelarasan akhir terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2027, sebagai dasar penetapan Renja Perangkat Daerah oleh kepala Perangkat Daerah. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah memberikan masukan dalam proses penyusunan dokumen ini. Semoga Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 dapat menjadi acuan yang efektif dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan tahun 2027 guna mendukung pencapaian target Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD Tahun 2025-2029.

Wonosobo, 30 Juli 2026

CAMAT SUKOHARJO

SETIAWAN NUGROHO, S.Sos,M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 196905281989031002

DAFTAR ISI

Halaman Judul..... 1
Kata Pengantar..... 2
Daftar Isi..... 3
Daftar Tabel 4
BAB I PENDAHULUAN 5
1.1. Latar Belakang 5
1.2. Dasar Hukum..... 6
1.3. Maksud dan Tujuan 8
1.4. Sistematika Penulisan 8
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN 13
2.1. Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan (IKU dan IKK Tahun 2025)..... 13
2.2. Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025 20
2.3. Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2027 24
2.4. Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD 24 .....
2.5. Inovasi Bidang Urusan..... .....
2.6. Review dan Perbandingan Rancangan Awal dengan Rancangan Akhir
Renja Perangkat Daerah..... .....
2.7. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 28
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 28
3.2. Arah Kebijakan..... 28
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 41
4.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Tahun 2027 .....
BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 62
5.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2027 .....
5.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2027 .....
BAB VI PENUTUP ....

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. TC 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2025 16

Tabel 2.2. TC 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan 22

Tabel 2.3. Usulan Program/Kegiatan/Sub kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2027..... 26

Tabel 3.1. Dukungan dan Sikronisasi Perencanaan Daerah Kabupaten Wonosobo 32

Tabel 3.2. TC 33 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028 46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Akhir Rencana Akhir Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut (Ranhir Renja) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode selama 1 (satu) tahun. Sebagaimana ketentuan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Pasal 138 ayat (2) mengamatkan bahwa Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

Ranhir Renja Kecamatan Sukoharjo adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukoharjo Tahun 2025-2029, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Penyusunan Ranhir Renja Kecamatan Sukoharjo dilakukan dengan melihat hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan. Dalam hal ini diperlukan kemampuan organisasi dalam membaca berbagai permasalahan yang mungkin dihadapi selama pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan dalam menentukan program dan kegiatan di tahun selanjutnya.

Dalam menentukan arah kebijakan dan program kegiatan pembangunan di Kecamatan Sukoharjo sesuai dengan Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo periode Tahun 2025-2030 yang telah dijabarkan dalam RPJMD 2025-2029 Kabupaten Wonosobo dan Renstra Kecamatan Sukoharjo Tahun 2025-2029 yang merupakan turunan dari RPJMD 2025-2029 Kabupaten Wonosobo. Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Perencanaan Kerja tahun 2027 Kecamatan Sukoharjo

mengacu pada tahapan I (pertama) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045 dengan tema “Penguatan Landasan Transformasi Ekosistem Agrobisnis dan Pariwisata yang Maju”.

1.2. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan dokumen Ranhir Renja 2027 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027;Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Sukoharjo Tahun 2027 adalah menyempurnakan Rancangan Awal Renja Kecamatan Sukoharjo agar selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Tahun 2027. Tujuannya adalah menghasilkan dokumen rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah yang definitif, terukur, dan menjadi bahan penyusunan RKA-PD serta Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Ranhir Renja Tahun 2027 adalah:

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD,Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan (IKU dan IKK Tahun 2025)

Menjelaskan evaluasi capaian kinerja bidang urusan berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025 sebagai capaian tahun pertama Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Substansi ini merupakan pengembangan dari sub bab Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017), yang disajikan dengan format Tabel T-C.29.

2.2. Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025

Bagi bidang urusan yang wajib menyelenggarakan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sub bab ini menyajikan evaluasi capaian SPM Tahun 2023-2025, sebagai pengembangan dari sub bab Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017), yang disajikan dengan format Tabel T-C.30.

2.3. Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2027

Berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2027, dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, serta kondisi lingkungan dinamis, dirumuskan permasalahan dan isu strategis yang memengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada Tahun 2027. Sub bab ini merupakan pengembangan dari sub bab Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

2.4. Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Menguraikan hasil telaah terhadap pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan kepada kepala daerah, untuk diselaraskan dengan program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka pengarusutamaan prinsip pencegahan korupsi (integrasi indikator Monitoring Center for Prevention/MCP) sesuai Permendagri Nomor 14 Tahun 2026.

2.5. Inovasi Bidang Urusan

Menjelaskan inovasi bidang urusan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebagai substansi baru yang ditambahkan dalam sistematika Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 sesuai Permendagri Nomor 14 Tahun 2026

2.6. Review dan Perbandingan Rancangan Awal dengan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah

Proses membandingkan antara Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan hasil analisis kebutuhan/Perkada tentang RKPD Tahun 2027;

- Alasan dilakukannya proses perbandingan tersebut;
- Temuan-temuan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dalam Rancangan Awal, atau program dan kegiatan yang sama namun besaran pagu anggarannya berbeda antara Rancangan Awal (pagu indikatif) dan Rancangan Akhir (pagu definitif);
- Tabel perbandingan disajikan dengan format Tabel T-C.31 (nama asli sesuai Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017), yang pada dokumen Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah diadaptasi untuk membandingkan kolom 'Rancangan Awal RKPD/Renja Perangkat Daerah' dengan kolom 'Hasil Analisis Kebutuhan/Rancangan Akhir berdasarkan Perkada RKPD'.

2.7. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menguraikan hasil kajian terhadap usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan (kelompok masyarakat, LSM, asosiasi, perguruan tinggi, dan Perangkat Daerah kabupaten/kota), termasuk penjelasan proses perolehan usulan dan kesesuaiannya dengan isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Disajikan dengan format Tabel T-C.32.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3. 1 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3. 2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2027 diselaraskan dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, RKPD Tahun 2027 (Perkada), serta kebijakan nasional/daerah lainnya. Pada Rancangan Akhir, arah kebijakan dipastikan telah konsisten dengan arah kebijakan dalam Perkada tentang RKPD Tahun 2027 yang telah ditetapkan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4. 1 Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Tahun 2027

Berisi rencana program, kegiatan, dan subkegiatan Tahun 2027 yang disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 2029, dan evaluasi capaian kinerja, program, kegiatan, serta subkegiatan tahun sebelumnya. Pada dokumen Rancangan Akhir, pagu indikatif pada Rancangan Awal telah disempurnakan menjadi pagu definitif sesuai Perkada tentang RKPD Tahun 2027, sebagaimana pengembangan dari format Tabel T-C.33 (Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dan Prakiraan Maju) pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

5.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2027

Menyajikan target IKU Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

5.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2027

Menyajikan target IKK Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

BAB VI PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan, antara lain penegasan bahwa Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 merupakan penyempurnaan dari Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD Tahun 2027, yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala BAPPEDA untuk diverifikasi paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan, sebelum ditetapkan sebagai Renja Perangkat Daerah definitif dan dijadikan pedoman penyusunan RKA-PD.

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan (IKU dan IKK Tahun 2025)

Capaian Rencana Kerja Kecamatan Sukoharjo Tahun 2025 adalah perbandingan antara Program/ Kegiatan yang tercantum di dalam Dokumen Renja Tahun 2025 dengan realisasi anggaran sesuai dengan alokasi anggaran yang diterima di Kecamatan Sukoharjo Tahun Anggaran 2025. Reviu Renja Tahun 2025 dilakukan oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sesuai pedoman reviu atas dokumen perencanaan Pembangunan dan anggaran daerah tahunan. Reviu bertujuan untuk memberi keyakinan terbatas bahwa dokumen perencanaan Pembangunan tahun 2025 telah disusun sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma guna meningkatkan kualitas dokumen perencanaan Pembangunan daerah. Berdasarkan hasil reviu dari APIP tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kesesuaian, keterhubungan informasi dalam Renja Tahun 2025 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan Rencana Strategis Kecamatan Sukoharjo, serta dokumen rancangan akhir Renja Tahun 2025 telah disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan. Kesimpulan dari hasil penilaian Rancangan Akhir Renja Tahun 2027 antara lain:

a. Dokumen pendukung rancangan akhir Renja 2025 belum sepenuhnya lengkap, antara lain kurangnya dokumen bukti pengiriman rancangan Renja PD ke Bappeda;
b. Tujuan dan sasaran rancangan akhir Renja Tahun 2025 telah sesuai dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
c. Rancangan akhir Renja Tahun 2025 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan Sukoharjo yaitu terdapat pada Rumusan dan sasaran Renja yang sepenuhnya tidak sesuai dengan sasaran Renstra dan tidak menyajikan kinerja program , kegiatan, dan sub kegiatan;
d. Penyusunan substansi antar bab dan sistematika penulisan Rancangan Akhir Renja Tahun 2025 belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, SE Bupati Wonosobo Nomor 000.7.3/0238/2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Surat Sekretaris Daerah Nomor 000.7.3/387 tentang Penyempurnaan Narasi Renja PD pada RKPD 2025.

Tabel dibawah ini menyajikan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kabupaten Wonosobo.

Tabel 2.1.

Tabel TC 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kabupaten Wonosobo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Keg iatan (Intermediate outcome)/Sub kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu 2025		
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**		2.379.656.007,00	2.379.656.007,00	2.856.936.034,00	2.856.936.034,00	100%
7	01				**KECAMATAN**		2.379.656.007,00	2.379.656.007,00	2.856.936.034,00	2.856.936.034,00	100%
7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Meningkatnya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.964.656.007,00	1.964.656.007,00	2.320.193.385,00	2.320.193.385,00	100%
7	01	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya Meningkatnya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100%
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Derah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Derah	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100%
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100%
7	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		1.796.156.007,00	1.796.156.007,00	2.092.693.385,00	2.092.693.385,00	100%
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1.796.156.007,00	1.796.156.007,00	2.092.693.385,00	2.092.693.385,00	100%
7	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	46.500.000,00	46.500.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	100%
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terdsedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100%
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.500.000,00	12.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	100%

7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100%
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100%
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100%
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100%
7	01	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	N/A	N/A	52.000.000,00	52.000.000,00	100%
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel	N/A	N/A	32.000.000,00	32.000.000,00	100%
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	N/A	N/A	20.000.000,00	20.000.000,00	100%
7	01	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.000.000,00	84.000.000,00	90.500.000,00	90.500.000,00	100%
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100%
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000,00	18.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	100%
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	65.500.000,00	65.500.000,00	73.000.000,00	73.000.000,00	100%
7	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	100%
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.000.000,00	24.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	100%
7	01	01	2.08	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100%
7	01	01	2.08	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100%
7	01	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Meningkatnya Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	85.000.000,00	85.000.000,00	113.000.000,00	113.000.000,00	100%
7	01	02	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	35.000.000,00	35.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00	100%
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Meningkatnya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	25.000.000,00	25.000.000,00	28.500.000,00	28.500.000,00	100%
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	100%

						Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					
7	01	02	2.01		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	50.000.000,00	50.000.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00	100%
7	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	50.000.000,00	50.000.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00	100%
7	01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Meningkatnya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	115.000.000,00	115.000.000,00	130.842.649,00	130.842.649,00	100%
7	01	03	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	30.500.000,00	30.500.000,00	100%
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	35.000.000,00	35.000.000,00	30.500.000,00	30.500.000,00	100%
7	01	03	2.06		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	80.000.000,00	80.000.000,00	100.342.649,00	100.342.649,00	100%
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan KesadaranKeluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan KesadaranKeluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	80.000.000,00	80.000.000,00	100.342.649,00	100.342.649,00	100%
7	01	04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Meningkatnya Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	45.000.000,00	45.000.000,00	65.400.000,00	65.400.000,00	100%
7	01	04	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Meningkatnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	45.000.000,00	45.000.000,00	65.400.000,00	65.400.000,00	100%
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	45.000.000,00	45.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	100%
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	N/A	N/A	10.400.000,00	10.400.000,00	100%
7	01	05			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Meningkatnya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	90.000.000,00	90.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	100%

7	01	05	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesual Penugasan Kepala Daerah**	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesual Penugasan Kepala Daerah	90.000.000,00	90.000.000,00	140.000.000,00		100%
7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi, Konsultasi)Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Meningkatnya Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi, Konsultasi)Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	90.000.000,00	90.000.000,00	130.000.000,00		100%
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	N/A	N/A	10.000.000,00		100%
7	01	06			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Meningkatnya Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	80.000.000,00	80.000.000,00	87.500.000,00		100%
7	01	06	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintaha Desa**	Meningkatnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintaha Desa	80.000.000,00	80.000.000,00	87.500.000,00		100%
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Meningkatnya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	80.000.000,00	80.000.000,00	35.000.000,00		100%
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Meningkatnya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	N/A	N/A	37.500.000,00		100%
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Meningkatnya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	N/A	N/A	15.000.000,00		100%

Sumber : Kecamatan Sukoharjo

Wonosobo, 30 Juli 2026

Camat Sukoharjo



SETIAWAN NUGROHO,S.Sos,MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 196905281989031002

2.2. Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025

Evaluasi capaian SPM Pelayanan Perangkat Daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dibawah ini.

Tabel 2.2

T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Indeks Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah	90.5	91	91.5	92	90.5	91	91.5	92	
			Nilai SAKIP Kecamatan	68	70	72	74	68	70	72	74	
			Persentase aset Perangkat Daerah dalam kondisi baik	100	100	100	100	100	100	100	100	
			Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100	100	100	100	
			Persentase keterisian data statistik sektoral	100	100	100	100	100	100	100	100	
			Nilai hasil pengawasan kearsipan	70	72	73	74	70	72	73	74	
			Persentase keselarasan program perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Mengkoordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	94.61	94.96	95.36	95.76	94.61	94.96	95.36	95.76	
			Persentase Keselarasan usulan di Musyawarah Desa dan Kelurahan dengan Prioritas Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Kelengkapan Data Pelaporan Intervensi Stunting sesuai tata waktu yang ditentukan	100	100	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Kelengkapan Data Pelaporan Intervensi Kemiskinan Sesuai Tata Waktu yang ditentukan	100	100	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Desa yang Melaksanakan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Kemiskinan Tepat Waktu	55	60	65	70	55	60	65	70	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Perempuan dan Masyarakat Rentan yang terlibat aktif dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah Kelurahan	30	30	30	30	30	30	30	30	

	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Keterwakilan Unsur Agama dan Kepercayaan Dalam Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Kejadian Kebencanaan	100	100	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Monitoring Evaluasi Antisipasi Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah yang dilaporkan	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Membina dan Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Persentase desa yang menyelesaikan Pelaporan APBDes Tepat Waktu		100	100	100	100	100	100	100	100	
		Persentase Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Desa yang sudah terselenggara		100	100	100	100	100	100	100	100	
		Persentase Kesesuaian Realiasasi Anggaran dan Pelaksanaan APBDes		100	100	100	100	100	100	100	100	
		Persentase keselarasan Perencanaan Desa dengan prioritas Daerah		100	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber : Kecamatan Sukoharjo

2.3. Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2027

Isu strategis merupakan persoalan-persoalan yang berkepanjangan dan memiliki pengaruh langsung terhadap situasi penting yang dihadapi oleh Kecamatan. Isu strategis adalah kebijakan fundamental atau perhatian program yang menentukan pilihan-pilihan yang dihadapi organisasi kecamatan saat ini dan di masa depan. Isu-isu ini dapat mencakup tantangan yang harus diatasi atau peluang yang harus dimanfaatkan untuk mencapai tujuan organisasi. Memperhatikan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan, maka isu-isu strategis yang ada di Kecamatan Sukoharjo dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Belum optimalnya fungsi tata kelola pemerintahan di tingkat kewilayahan;
2. Belum optimalnya Pelayanan Publik di tingkat kecamatan;
3. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kewilayahan (IKM yang hanya diukur dari sisi PATEN, belum secara keseluruhan)
4. Belum optimalnya koordinasi pemberdayaan masyarakat terkait dengan penanganan permasalahan daerah di tingkat kewilayahan (kemiskinan, pendidikan, stunting, kelompok rentan);
5. Belum optimalnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kewilayahan;
6. Belum optimalnya pelaporan upaya pencegahan konflik (sebagai bahan pemetaan potensi konflik di tingkat kewilayahan);
7. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

2.4. Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD

2.5. Inovasi Bidang Urusan

2.6. Review dan Perbandingan Rancangan Awal dengan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah

2.7. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Sukoharjo pada tahun 2027 dihimpun dalam suatu Musyawarah Rencana Pembangunan yang diselenggarakan pada tahun 2026. Kegiatan Musrenbang diselenggarakan

dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya melalui:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi wewenang Kecamatan dan Peningkatan kualitas apaturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Forkompincam, Dinas/Instansi/Lintas Sektor dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah. Telaah usulan program dan kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Kecamatan Sukoharjo, maka keempat hal tersebut diatas perlu dilaksanakan oleh pengemban delegasi.

Tabel 2.3.

Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Tahun 2027

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan Sukoharjo	Meningkatnya Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2 Kegiatan	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Sukoharjo	Meningkatnya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2 Kegiatan	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Sukoharjo	Meningkatnya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1 Kegiatan	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Sukoharjo	Meningkatnya Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Kegiatan	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Sukoharjo	Meningkatnya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6 Kegiatan	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kecamatan Sukoharjo	Meningkatnya Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1 Kegiatan	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Salah satu faktor dalam penyusunan Rencana Kerja yaitu dengan mempertimbangkan Rencana Strategis Kecamatan Sukoharjo yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD. Program kerja yang terdapat dalam Rencana Strategis Kecamatan Sukoharjo merupakan Program Kerja Lima Tahunan, yang dalam pelaksanaannya tetap menggunakan penjenjangan tiap tahun.

A. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Tujuan penyusunan Renja Kecamatan Sukoharjo tahun 2027 adalah merumuskan kebijakan dan program strategi yang menjamin pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Sukoharjo yang efisien dan efektif berdasarkan pada prinsip-prinsip taat pemerintahan yang baik. Adapun tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat Indikator tujuan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (Permenpan 14/17) ;
2. Peningkatan cakupan sasaran program bantuan sosial Indikator tujuan yaitu Cakupan PPKS yang mendapatkan bantuan sosial;
3. Meningkatkan Partisipasi Publik Dalam Politik Tingkat partisipasi pemilih;
4. Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan keamanan rasio penyelesaian konflik sosial Indikator tujuan yaitu Meningkatkan lapangan kerja Persentase peningkatan serapan tenaga kerja dalam pengelolaan APBDesa;
5. Meningkatkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di wilayah Kecamatan Indikator tujuan yaitu Angka putus sekolah Pendidikan Dasar;

6. Menurunkan angka stunting di wilayah kecamatan Indikator tujuan yaitu Prevalensi stunting di kecamatan.

B. Adapun yang menjadi sasaran Pemerintah Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo adalah:

1. Meningkatnya nilai SKM Indikator Sasaran : Persentase kenaikan nilai SKM;
2. Meningkatnya kualitas data sasaran program bantuan sosial Indikator Sasaran : Persentase desa yang melakukan verval data secara kontinyu ;
3. Meningkatnya dukungan sosial kepada kelompok rentan Indikator Sasaran : Persentase kenaikan dana sosial keagamaan ;
4. Meningkatnya kondusifitas wilayah Indikator Sasaran : Persentase pelanggaran tramtibum yang terlaporkan;
5. Menurunnya angka putus sekolah Indikator Sasaran : Rasio anak putus sekolah Pendidikan dasar yang tertangani;
6. Meningkatkan kualitas gizi keluarga Indikator Sasaran : Persentase balita stunting yang tertangani ;
7. Meningkatnya kontribusi komponen ekonomi dalam Indeks Desa Membangun Indikator Sasaran : Indeks ketahanan ekonomi Indeks Desa Membangun;
8. Meningkatnya bobot (perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja) disesuaikan kondisi keamatan , Indikator Sasaran : Nilai komponen pelaporan kinerja pada SAKIP.

3.2. Arah Kebijakan

Kecamatan Sukoharjo terdiri dari 17 Desa, dalam rangka mewujudkan Visi Bupati terpilih yaitu “Mewujudkan Wonosobo Sejahtera, Adil Dan Makmur”. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dibutuhkan sumberdaya aparatur dan pelayanan yang memadahi yang didukung dengan sarana dan prasarana kantor yang baik. Disamping itu partisipasi masyarakat juga sangat di perlukan baik dalam perencanaan

pembangunan, pemahaman tentang hukum, menjaga keamanan dan ketertiban kampung secara mandiri dan kegiatan lain yang dapat mendatangkan manfaat yang baik. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Tabel Dukungan dan Sikronisasi Perencanaan Daerah Kabupaten Wonosobo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub kegiatan	Aktifitas/ Pekerjaan	Lokasi Indikatif	Sasaran (Penerima manfaat)	Dukungan						Catatan Penting
							Prioritas Nasional	ProSN	Misi	Program Prioritas/ Program Unggulan Kabupaten	Program Taktis	Strategi Kabupaten	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	UNSUR KEWILAYAHAN												
	KECAMATAN												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sukoharjo	Masyarakat Wilayah Kecamatan Sukoharjo	N/A	N/A	Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Kompeten, Akuntabel, dan Terpercaya Sebagai Pengamban Ampera	N/A	N/A	N/A	N/A
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlakasananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Sukoharjo	Masyarakat Wilayah Kecamatan Sukoharjo	Koordinasi Satu Data Wonosobo di tingkat kewilayahan	N/A	Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Kompeten, Akuntabel, dan Terpercaya Sebagai Pengamban Ampera	Fasilitasi penunjang satu data (Internet dll)	N/A	N/A	N/A
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Derah	Meningkatnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Derah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Derah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Derah	Kecamatan Sukoharjo	Masyarakat Wilayah Kecamatan Sukoharjo	N/A	N/A	Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Kompeten, Akuntabel, dan Terpercaya Sebagai Pengamban Ampera	N/A	N/A	N/A	N/A
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Sukoharjo	Masyarakat Wilayah Kecamatan Sukoharjo	N/A	N/A	Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Kompeten, Akuntabel, dan Terpercaya Sebagai Pengamban Ampera	N/A	N/A	N/A	N/A

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Sukoharjo	Masyarakat Wilayah Kecamatan Sukoharjo	N/A	N/A	Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Kompeten, Akuntabel, dan Terpercaya Sebagai Pengamban Ampera	N/A	N/A	N/A	N/A
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyusunan Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Sukoharjo	Masyarakat Wilayah Kecamatan Sukoharjo	N/A	N/A	Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Kompeten, Akuntabel, dan Terpercaya Sebagai Pengamban Ampera	N/A	N/A	N/A	N/A
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Sukoharjo	Masyarakat Wilayah Kecamatan Sukoharjo	N/A	N/A	Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Kompeten, Akuntabel, dan Terpercaya Sebagai Pengamban Ampera	N/A	N/A	N/A	N/A
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Melaksanakan Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Sukoharjo	Masyarakat Wilayah Kecamatan Sukoharjo	N/A	N/A	Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Kompeten, Akuntabel, dan Terpercaya Sebagai Pengamban Ampera	N/A	N/A	N/A	N/A
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Menyediakan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Sukoharjo	Masyarakat Wilayah Kecamatan Sukoharjo	N/A	N/A	Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Kompeten, Akuntabel, dan Terpercaya Sebagai Pengamban Ampera	N/A	N/A	N/A	N/A
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Meningkatnya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Menyediakan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Sukoharjo	Masyarakat Wilayah Kecamatan Sukoharjo	N/A	N/A	Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Kompeten, Akuntabel, dan Terpercaya Sebagai Pengamban Ampera	N/A	N/A	N/A	N/A
	Penyediaan Barang	Meningkatnya	Terlaksananya	Menyediakan	Kecamatan	Masyarakat	N/A	N/A	Implementasi	N/A	N/A	N/A	N/A

	Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan	Sukoharjo	Wilayah Kecamatan Sukoharjo			Tata Kelola Pemerintahan Yang Kompeten, Akuntabel, dan Terpercaya Sebagai Pengamban Ampera				
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Menyediakan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Sukoharjo	Masyarakat Wilayah Kecamatan Sukoharjo	N/A	N/A	Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Kompeten, Akuntabel, dan Terpercaya Sebagai Pengamban Ampera	N/A	N/A	N/A	N/A
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Menyelenggara kan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Sukoharjo	Masyarakat Wilayah Kecamatan Sukoharjo	N/A	N/A	Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Kompeten, Akuntabel, dan Terpercaya Sebagai Pengamban Ampera	N/A	N/A	N/A	N/A
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ya	Terlaksanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ya	Menyelenggara kan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Sukoharjo	Masyarakat Wilayah Kecamatan Sukoharjo	N/A	N/A	Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Kompeten, Akuntabel, dan Terpercaya Sebagai Pengamban Ampera	N/A	N/A	N/A	N/A
	Pengadaan Mebel	Meningkatnya Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel	Menyelenggara kan Pengadaan Mebel	Kecamatan Sukoharjo	Masyarakat Wilayah Kecamatan Sukoharjo	N/A	N/A	Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Kompeten, Akuntabel, dan Terpercaya Sebagai Pengamban Ampera	N/A	N/A	N/A	N/A
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Menyelenggara kan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Sukoharjo	Masyarakat Wilayah Kecamatan Sukoharjo	N/A	N/A	Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Kompeten, Akuntabel, dan Terpercaya Sebagai Pengamban Ampera	N/A	N/A	N/A	N/A
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Meningkatnya Penyediaan Jasa	Terlaksananya Penyediaan	Menyediakan Jasa	Kecamatan Sukoharjo	Masyarakat Wilayah	N/A	N/A	Implementasi Tata Kelola	N/A	N/A	N/A	N/A

	Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kecamatan Sukoharjo			Pemerintahan Yang Kompeten, Akuntabel, dan Terpercaya Sebagai Pengamban Ampera				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Menyediakan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Sukoharjo	Masyarakat Wilayah Kecamatan Sukoharjo	N/A	N/A	Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Kompeten, Akuntabel, dan Terpercaya Sebagai Pengamban Ampera	N/A	N/A	N/A	N/A
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Menyediakan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Sukoharjo	Masyarakat Wilayah Kecamatan Sukoharjo	N/A	N/A	Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Kompeten, Akuntabel, dan Terpercaya Sebagai Pengamban Ampera	N/A	N/A	N/A	N/A
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Menyediakan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Sukoharjo	Masyarakat Wilayah Kecamatan Sukoharjo	N/A	N/A	Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Kompeten, Akuntabel, dan Terpercaya Sebagai Pengamban Ampera	N/A	N/A	N/A	N/A
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Menyediakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sukoharjo	Masyarakat Wilayah Kecamatan Sukoharjo	N/A	N/A	Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Kompeten, Akuntabel, dan Terpercaya Sebagai Pengamban Ampera	N/A	N/A	N/A	N/A
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Menyediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Sukoharjo	Masyarakat Wilayah Kecamatan Sukoharjo	N/A	N/A	Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Kompeten, Akuntabel, dan Terpercaya Sebagai Pengamban Ampera	N/A	N/A	N/A	N/A

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Trlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Melaksanakan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Sukoharjo	Masyarakat Wilayah Kecamatan Sukoharjo	N/A	N/A	Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Kompeten, Akuntabel, dan Terpercaya Sebagai Pengamban Ampera	N/A	N/A	N/A	N/A
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meningkatnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Melaksanakan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Sukoharjo	Masyarakat Wilayah Kecamatan Sukoharjo	N/A	N/A	Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Kompeten, Akuntabel, dan Terpercaya Sebagai Pengamban Ampera	N/A	N/A	N/A	N/A
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyusunan Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan Sukoharjo	Masyarakat Wilayah Kecamatan Sukoharjo	N/A	N/A	Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Kompeten, Akuntabel, dan Terpercaya Sebagai Pengamban Ampera	N/A	N/A	N/A	N/A
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sukoharjo	Masyarakat Wilayah Kecamatan Sukoharjo	Koordinasi Pengelolaan Sampah di tingkat Desa/Kelurahan berbasis Reduce-Reuse-Recycle (3R)	N/A	Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Kompeten, Akuntabel, dan Terpercaya Sebagai Pengamban Ampera	Koordinasi Pengelolaan Sampah di tingkat Desa/Kelurahan berbasis Reduce-Reuse-Recycle (3R	N/A	N/A	N/A
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Meningkatnya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Melaksanakan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Kecamatan Sukoharjo	Masyarakat Wilayah Kecamatan Sukoharjo	N/A	N/A	Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Kompeten, Akuntabel, dan Terpercaya Sebagai Pengamban Ampera	N/A	N/A	N/A	N/A
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Melaksanakan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sukoharjo	Masyarakat Wilayah Kecamatan Sukoharjo	N/A	N/A	Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Kompeten, Akuntabel, dan Terpercaya Sebagai Pengamban Ampera	N/A	N/A	N/A	N/A
	Pelaksanaan Urusan	Meningkatnya	Terlaksananya	Melaksanakan	Kecamatan	Masyarakat	N/A	N/A	Implementasi	N/A	N/A	N/A	N/A

	Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Sukoharjo	Wilayah Kecamatan Sukoharjo			Tata Kelola Pemerintahan Yang Kompeten, Akuntabel, dan Terpercaya Sebagai Pengamban Ampera				
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Sukoharjo	Masyarakat Wilayah Kecamatan Sukoharjo	Pemenuhan Layanan Publik Yang Inklusif	N/A	Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Kompeten, Akuntabel, dan Terpercaya Sebagai Pengamban Ampera	Layanan Administrasi Kependudukan (jemput bola)			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Sukoharjo	Masyarakat Wilayah Kecamatan Sukoharjo	N/A	N/A	Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Kompeten, Akuntabel, dan Terpercaya Sebagai Pengamban Ampera	N/A	N/A	N/A	N/A
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Melaksanakan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Sukoharjo	Masyarakat Wilayah Kecamatan Sukoharjo	Fasilitasi dan Koordinasi Koperasi Merah Putih	N/A	Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Kompeten, Akuntabel, dan Terpercaya Sebagai Pengamban Ampera	Fasilitasi Koperasi Merah Putih	N/A	N/A	N/A
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Melaksanakan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sukoharjo	Masyarakat Wilayah Kecamatan Sukoharjo	Koordinasi Program Pembelajaran Daring Non Formal (Pendidikan Kesetaraan) Usia 25-30 Tahun	N/A	Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Kompeten, Akuntabel, dan Terpercaya Sebagai Pengamban Ampera	Fasilitasi Wajib Belajar 13 tahun	N/A	N/A	N/A
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Melaksanaka Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Sukoharjo	Masyarakat Wilayah Kecamatan Sukoharjo	Penanganan Kemiskinan Dan Stunting Terintegrasi	N/A	Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Kompeten, Akuntabel, dan Terpercaya Sebagai Pengamban Ampera	Fasilitasi Penanganan Stunting (TPPS, Rakor linsek, monev	N/A	N/A	N/A
	Penumbuhan dan Peningkatan	Meningkatnya Penumbuhan dan	Terlaksananya Penumbuhan	Melaksanakan Kegiatan	Kecamatan Sukoharjo	Masyarakat Wilayah	Implementasi Prinsip	N/A	Implementasi Tata Kelola	Fasilitasi penanganan	N/A	N/A	N/A

	KesadaranKeluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Peningkatan KesadaranKeluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	dan Peningkatan KesadaranKeluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan KesadaranKeluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		Kecamatan Sukoharjo	Kabupaten Wonosobo Ramah HAM pada pelaksanaan program dan kegiatan di kecamatn		Pemerintahan Yang Kompeten, Akuntabel, dan Terpercaya Sebagai Pengamban Ampera	masalah sosial kemasyarakatan			
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Melaksanaka Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kecamatan Sukoharjo	Masyarakat Wilayah Kecamatan Sukoharjo	N/A	N/A	Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Kompeten, Akuntabel, dan Terpercaya Sebagai Pengamban Ampera	N/A	N/A	N/A	N/A
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Melaksanakan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Sukoharjo	Masyarakat Wilayah Kecamatan Sukoharjo	N/A	N/A	Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Kompeten, Akuntabel, dan Terpercaya Sebagai Pengamban Ampera	N/A	N/A	N/A	N/A
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Melaksanakan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sukoharjo	Masyarakat Wilayah Kecamatan Sukoharjo	N/A	N/A	Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Kompeten, Akuntabel, dan Terpercaya Sebagai Pengamban Ampera	N/A	N/A	N/A	N/A
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Melaksanakan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Sukoharjo	Masyarakat Wilayah Kecamatan Sukoharjo	N/A	N/A	Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Kompeten, Akuntabel, dan Terpercaya Sebagai Pengamban Ampera	N/A	N/A	N/A	N/A
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	Meningkatnya Program Penyelenggaraan	Terlaksananya Program Penyelenggaraa	Melaksanak Program Penyelenggara	Kecamatan Sukoharjo	Masyarakat Wilayah Kecamatan	N/A	N/A	Implementasi Tata Kelola Pemerintahan	N/A	N/A	N/A	N/A

	PEMERINTAHAN UMUM	Urusan Pemerintahan Umum	n Urusan Pemerintahan Umum	an Urusan Pemerintahan Umum		Sukoharjo			Yang Kompeten, Akuntabel, dan Terpercaya Sebagai Pengamban Ampera				
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesual Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesual Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesual Penugasan Kepala Daerah	Melaksanakan Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum Sesual Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Sukoharjo	Masyarakat Wilayah Kecamatan Sukoharjo	N/A	N/A	Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Kompeten, Akuntabel, dan Terpercaya Sebagai Pengamban Ampera	N/A	N/A	N/A	N/A
	Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi, Konsultasi)Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Meningkatnya Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi, Konsultasi)Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi, Konsultasi)Waw asan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Melaksanakan Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi, Konsultasi)Wa wasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Sukoharjo	Masyarakat Wilayah Kecamatan Sukoharjo	N/A	N/A	Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Kompeten, Akuntabel, dan Terpercaya Sebagai Pengamban Ampera	N/A	N/A	N/A	N/A
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Melaksanakan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Sukoharjo	Masyarakat Wilayah Kecamatan Sukoharjo	N/A	N/A	Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Kompeten, Akuntabel, dan Terpercaya Sebagai Pengamban Ampera	N/A	N/A	N/A	N/A
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Meningkatnya Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Melaksanakan Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Sukoharjo	Masyarakat Wilayah Kecamatan Sukoharjo	N/A	N/A	Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Kompeten, Akuntabel, dan Terpercaya Sebagai Pengamban Ampera	N/A	N/A	N/A	N/A
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintaha Desa	Meningkatnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintaha Desa	Terlaksananya Meningkatnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintaha Desa	Melaksanakan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintaha Desa	Kecamatan Sukoharjo	Masyarakat Wilayah Kecamatan Sukoharjo	N/A	N/A	Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Kompeten, Akuntabel, dan Terpercaya Sebagai Pengamban Ampera	N/A	N/A	N/A	N/A

	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Meningkatnya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Melaksanakan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Sukoharjo	Masyarakat Wilayah Kecamatan Sukoharjo	N/A	N/A	Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Kompeten, Akuntabel, dan Terpercaya Sebagai Pengamban Ampera	N/A	N/A	N/A	N/A
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Meningkatnya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Melaksanakan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaa n Aset Desa	Kecamatan Sukoharjo	Masyarakat Wilayah Kecamatan Sukoharjo	N/A	N/A	Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Kompeten, Akuntabel, dan Terpercaya Sebagai Pengamban Ampera	N/A	N/A	N/A	N/A
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Meningkatnya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Melaksanakan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Sukoharjo	Masyarakat Wilayah Kecamatan Sukoharjo	N/A	N/A	Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Kompeten, Akuntabel, dan Terpercaya Sebagai Pengamban Ampera	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : Kecamatan Sukoharjo

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Tahun 2027

Ranhir Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sukoharjo Tahun 2027 merupakan dokumen turunan dari Rencana Strategis (RENSTRA) yang memuat arah kebijakan, prioritas program, serta prakiraan kebutuhan anggaran kecamatan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo. Dokumen ini menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam memastikan kesinambungan antara perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran berbasis kinerja.

Dokumen Ranhir rencana kerja Kecamatan Sukoharjo memperlihatkan konsistensi terhadap arah pembangunan daerah, yaitu melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang kompeten, akuntabel, transparan, partisipatif, dan inklusif. Fokus kegiatan dibagi ke dalam enam program utama antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   Menjadi dasar operasional kelembagaan kecamatan dengan kegiatan seperti:
   a. Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah,
   b. Pengelolaan administrasi keuangan,
   c. Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor,
   d. Penyediaan barang dan jasa penunjang kegiatan pemerintahan.

   Program ini menyerap alokasi terbesar, menunjukkan bahwa pemerintah daerah memprioritaskan keberlanjutan fungsi administratif dan pelayanan internal sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang efektif.
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan:
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD
   b. Penyusunan Dokumen Perencanaan

c. Evaluasi Kinerja
d. Administrasi Keuangan PD
e. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
f. Administrasi Umum PD
g. Pengadaan listrik, peralatan kantor, rumah tangga, cetakan, bahan bacaan, dan rapat koordinasi
h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
i. Surat menyurat, komunikasi, dan pelayanan umum kantor
j. Pemeliharaan Barang Milik Daerah
k. Pemeliharaan kendaraan, peralatan, gedung kantor.

3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Difokuskan untuk memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dan instansi vertikal. Kegiatan seperti peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan dan koordinasi pelayanan umum di tingkat kecamatan mendukung terciptanya birokrasi yang sinergis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan :

a. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan
b. Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan instansi vertical
c. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Umum
d. Koordinasi pemeliharaan sarana pelayanan publik
e. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada CamatPelaporan pelaksanaan kewenangan

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Berorientasi pada peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat, seperti kegiatan pemberdayaan keluarga dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Ini menunjukkan peran kecamatan sebagai simpul penggerak pembangunan partisipatif di tingkat akar rumput.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan :

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
b. Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat
c. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
d. Penumbuhan kesadaran keluarga menuju keluarga berkualitas

5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Difokuskan pada sinergi dengan TNI, Polri, dan tokoh masyarakat dalam menciptakan keamanan wilayah. Kegiatan ini memperkuat fungsi kecamatan sebagai penjaga stabilitas sosial dan koordinasi ketertiban umum.

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan :

a. Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban Umum
b. Sinergitas dengan TNI, Polri, dan instansi vertikal
c. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan masyarakat

6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Menitikberatkan pada pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, serta pelaksanaan tugas-tugas koordinatif forum pimpinan kecamatan. Program ini mencerminkan upaya daerah dalam menjaga integritas pemerintahan dan kohesi sosial masyarakat.

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan :

a. Fasilitasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pembinaan
b. Pelaksanaan Tugas Forkopimcam Dukungan kegiatan koordinasi pimpinan kecamatan

7. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Menjadi wujud pelaksanaan fungsi pembinaan kecamatan terhadap tata kelola pemerintahan desa. Kegiatan seperti fasilitasi administrasi, pengelolaan keuangan desa, hingga sinkronisasi

perencanaan pembangunan desa dengan kabupaten menjadi langkah penting menuju desa mandiri dan akuntabel.

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan :

a. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa
b. Fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa
c. Fasilitasi pemilihan kepala desa
d. Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dan desa

Sumber pendanaan Kecamatan Sukoharjo yaitu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonosobo, baik melalui Belanja Langsung perangkat daerah maupun dukungan lintas sektor; Dana transfer ke desa (DD dan ADD) yang difasilitasi dan diawasi oleh kecamatan; Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat, termasuk potensi kerja sama antar lembaga atau pihak ketiga dalam bentuk kemitraan sosial.

Tabel 4.1.

TC 33 Rumusan Rencana Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028 Kabupaten Wonosobo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Kecamatan Sukoharjo						**2.835.737.104,00**								**3.523.500.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.835.737.104,00**								**3.523.500.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.835.737.104,00**								**3.523.500.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.308.994.455,00**								**2.843.500.000,00**	
		-	-	-		-	-	2.280.494.455,00							-	2.765.000.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.000.000,00						-		5.000.000,00	
		-						3.000.000,00						-		5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	1.500.000,00							-	2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	1.500.000,00							-	2.500.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.500.000,00			-	-	Transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas dan inklusif			2.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	3 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	2.500.000,00	Kecamatan Sukoharjo
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.500.000,00			-	-	Transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas dan inklusif			2.500.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	3 Laporan	1.500.000,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	2.500.000,00	Kecamatan Sukoharjo
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.077.194.455,00						-		2.500.000.000,00	
		-						2.077.194.455,00						-		2.500.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	2.077.194.455,00							-	2.500.000.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.077.194.455,00			-	-	Transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel,			2.500.000.000,00	

															berintegritas dan inklusif					
					Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	20 Orang/bulan	2.077.194.455,00	Kab. Wonosobo	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	2.500.000.000,00	Kecamatan Sukoharjo
	7.01.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah						45.500.000,00						-		58.000.000,00	
					-						45.500.000,00						-		58.000.000,00	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	0,00							-	3.000.000,00	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	25.000.000,00							-	30.000.000,00	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	3.000.000,00							-	4.000.000,00	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	2.000.000,00							-	3.000.000,00	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	13.500.000,00							-	15.000.000,00	
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	2.000.000,00							-	3.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001				Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.000.000,00			-	-	Transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas dan inklusif			3.000.000,00	
					Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.000.000,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	3.000.000,00	Kecamatan Sukoharjo
	7.01.01.2.06.0002				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						13.500.000,00			-	-	Transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas dan inklusif			15.000.000,00	
					Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	13.500.000,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	15.000.000,00	Kecamatan Sukoharjo
	7.01.01.2.06.0003				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						2.000.000,00			-	-	Transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas dan inklusif			3.000.000,00	

					Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.000.000,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	3.000.000,00	Kecamatan Sukoharjo
	7.01.01.2.06.0005				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.000.000,00			-	-	Transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas dan inklusif			4.000.000,00	
					Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	3.000.000,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	4.000.000,00	Kecamatan Sukoharjo
	7.01.01.2.06.0006				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0,00			-	-	Transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas dan inklusif			3.000.000,00	
					Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	3.000.000,00	Kecamatan Sukoharjo
	7.01.01.2.06.0009				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						25.000.000,00			-	-	Transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas dan inklusif			30.000.000,00	
					Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	30.000.000,00	Kecamatan Sukoharjo
	7.01.01.2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00						-		70.000.000,00	
					-						0,00						-		70.000.000,00	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00							-	30.000.000,00	
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00							-	40.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0006				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00			-	-	Transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas dan inklusif			30.000.000,00	
					Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	4 Unit	0,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	30.000.000,00	Kecamatan Sukoharjo
	7.01.01.2.07.0011				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00			-	-	Transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel,			40.000.000,00	

															berintegritas dan inklusif				
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	50 Unit	0,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	40.000.000,00	Kecamatan Sukoharjo
	7.01.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						142.300.000,00						-		160.500.000,00	
					-						142.300.000,00						-		160.500.000,00	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	15.700.000,00							-	20.000.000,00	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	126.100.000,00							-	140.000.000,00	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	500.000,00							-	500.000,00	
	7.01.01.2.08.0001				Penyediaan Jasa Surat Menyurat						500.000,00			-	-	Transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas dan inklusif			500.000,00	
					Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	500.000,00	Kab. Wonosobo	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	500.000,00	Kecamatan Sukoharjo
	7.01.01.2.08.0002				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						15.700.000,00			-	-	Transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas dan inklusif			20.000.000,00	
					Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	15.700.000,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	20.000.000,00	Kecamatan Sukoharjo
	7.01.01.2.08.0004				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						126.100.000,00			-	-	Transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas dan inklusif			140.000.000,00	
					Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	126.100.000,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	140.000.000,00	Kecamatan Sukoharjo
	7.01.01.2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						41.000.000,00						-		50.000.000,00	
					-						41.000.000,00						-		50.000.000,00	

						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	10.000.000,00							-	10.000.000,00	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	25.000.000,00							-	30.000.000,00	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	6.000.000,00							-	10.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						25.000.000,00			-	-	Transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas dan inklusif			30.000.000,00	
					Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	9 Unit	25.000.000,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	30.000.000,00	Kecamatan Sukoharjo
	7.01.01.2.09.0006				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						6.000.000,00			-	-	Transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas dan inklusif			10.000.000,00	
					Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	13 Unit	6.000.000,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	10.000.000,00	Kecamatan Sukoharjo
	7.01.01.2.09.0009				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						10.000.000,00			-	-	Transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas dan inklusif			10.000.000,00	
					Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	3 Unit	10.000.000,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	10.000.000,00	Kecamatan Sukoharjo
2.	**7.01.02**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**81.000.000,00**								**105.000.000,00**	
						-	-		-	-	81.000.000,00							-	105.000.000,00	
	7.01.02.2.01				Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						24.000.000,00						-		25.000.000,00	
					-						24.000.000,00						-		25.000.000,00	
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	-	24.000.000,00							-	25.000.000,00	

	7.01.02.2.01.0001				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						24.000.000,00			-	-	Transformasi sumber daya manusia yang produktif dan berkualitas			25.000.000,00	
					Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	1 Laporan	24.000.000,00	Kab. Wonosobo	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	25.000.000,00	Kecamatan Sukoharjo
	7.01.02.2.03				Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum						12.000.000,00						-		20.000.000,00	
					-						12.000.000,00						-		20.000.000,00	
						Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	-		-	-	12.000.000,00						-	20.000.000,00	
	7.01.02.2.03.0001				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum						12.000.000,00			-	-	Transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas dan inklusif			20.000.000,00	
					Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	-		-	1 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Wonosobo	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	20.000.000,00	Kecamatan Sukoharjo
	7.01.02.2.04				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						45.000.000,00						-		60.000.000,00	
					-						45.000.000,00						-		60.000.000,00	
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-		-	-	45.000.000,00						-	60.000.000,00	
	7.01.02.2.04.0003				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						45.000.000,00			-	-	Transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas dan inklusif			60.000.000,00	
					Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-		-	1 Laporan	45.000.000,00	Kab. Wonosobo	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	60.000.000,00	Kecamatan Sukoharjo
3.	**7.01.03**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN**						**182.742.649,00**								**240.000.000,00**	

					MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															
					-	-		-	-	182.742.649,00							-	240.000.000,00	
	7.01.03.2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					62.770.000,00						-		100.000.000,00	
					-					62.770.000,00						-		100.000.000,00	
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	62.770.000,00							-	100.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0003				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					62.770.000,00			-	-	-			100.000.000,00	
					Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	1 Laporan	62.770.000,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	100.000.000,00	Kecamatan Sukoharjo
	7.01.03.2.03				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					30.230.000,00						-		50.000.000,00	
					-					30.230.000,00						-		50.000.000,00	
						Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-		-	-	15.230.000,00							-	30.000.000,00	
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	15.000.000,00							-	20.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0002				Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					15.000.000,00			-	-	Peningkatan kesejahteraan sosial dan kemandirian sosial ekonomi			20.000.000,00	
					Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	1 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00	Kab. Wonosobo	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	20.000.000,00	Kecamatan Sukoharjo
	7.01.03.2.03.0004				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					15.230.000,00			-	-	Transformasi perekonomian daerah berbasis sektor unggulan yang berdaya saing dan inklusif			30.000.000,00	
					Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-		-	1 Laporan	15.230.000,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	30.000.000,00	Kecamatan Sukoharjo
	7.01.03.2.06				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					89.742.649,00						-		90.000.000,00	
					-					89.742.649,00						-		90.000.000,00	
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga	-		-	-	89.742.649,00							-	90.000.000,00	

						dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas														
	7.01.03.2.06.0012				Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas					89.742.649,00			-	-	Transformasi sumber daya manusia yang produktif dan berkualitas			90.000.000,00	
					Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	-		-	175 Keluarga	89.742.649,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	90.000.000,00	Kecamatan Sukoharjo
4.	**7.01.04**				**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**45.000.000,00**								**65.000.000,00**	
						-	-		-	-	45.000.000,00							-	65.000.000,00	
	7.01.04.2.01				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						45.000.000,00						-		65.000.000,00	
					-						45.000.000,00						-		65.000.000,00	
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		-	-	45.000.000,00							-	65.000.000,00	
	7.01.04.2.01.0001				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					45.000.000,00			-	-	Transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas dan inklusif			65.000.000,00	
					Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		-	1 Laporan	45.000.000,00	Kab. Wonosobo	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	65.000.000,00	Kecamatan Sukoharjo
5.	**7.01.05**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**118.000.000,00**								**135.000.000,00**	
						-	-		-	-	118.000.000,00							-	135.000.000,00	
	7.01.05.2.01				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						118.000.000,00						-		135.000.000,00	
					-						118.000.000,00						-		135.000.000,00	
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	-	10.000.000,00							-	15.000.000,00	

							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	-	108.000.000,00							-	120.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0001				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						108.000.000,00			-	-	Peningkatan harmonisasi keberagaman			120.000.000,00	
					Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	500 Orang	108.000.000,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	120.000.000,00	Kecamatan Sukoharjo
	7.01.05.2.01.0008				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						10.000.000,00			-	-	Transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas dan inklusif			15.000.000,00	
					Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	15.000.000,00	Kecamatan Sukoharjo
6.	**7.01.06**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**100.000.000,00**								**135.000.000,00**	
						-	-		-	-	55.000.000,00							-	110.000.000,00	
	7.01.06.2.01				Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan						100.000.000,00						-		135.000.000,00	

						dan Pengawasan Pemerintahan Desa													
						-						100.000.000,00						-		135.000.000,00	
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-		-	-	15.000.000,00							-		0,00	
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	-		-	-	15.000.000,00							-		25.000.000,00	
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-		-	-	10.000.000,00							-		25.000.000,00	
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	-	30.000.000,00							-		40.000.000,00	
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	-	30.000.000,00							-		45.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0002					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						30.000.000,00			-	-	Transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas dan inklusif			40.000.000,00	
						Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	40.000.000,00	Kecamatan Sukoharjo
	7.01.06.2.01.0003					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						30.000.000,00			-	-	Transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas dan inklusif			45.000.000,00	
						Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	45.000.000,00	Kecamatan Sukoharjo
	7.01.06.2.01.0006					Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						15.000.000,00			-	-	Transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas dan inklusif			0,00	
						Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-		-	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	Kecamatan Sukoharjo

	7.01.06.2.01.0009					Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						10.000.000,00			-	-	Transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas dan inklusif			25.000.000,00	
						Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	25.000.000,00	Kecamatan Sukoharjo
	7.01.06.2.01.0016					Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						15.000.000,00			-	-	Peningkatan kesejahteraan sosial dan kemandirian sosial ekonomi			25.000.000,00	
						Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	-		-	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	25.000.000,00	Kecamatan Sukoharjo
	J U M L A H											**2.835.737.104,00**								**3.523.500.000,00**	

BAB V

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

5.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2027

Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Sukoharjo Tahun 2027 sesuai dengan visi misi. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan sebagai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo beserta target disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran Daerah dan PD/ Program Nomenklatur)	Satuan Indikator Kinerja	CAPAIAN	TARGET						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	**Persentase Pelimpahan Kewenangan Daerah di Kecamatan yang dilaksanakan Kecamatan**	%	N/A	100	100	100	100	100	100	Indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan
2	**Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan**	Angka	N/A	90	92.84	93.64	94.45	95.26	96.06	Indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan
3	**SAKIP Kecamatan**									Indikator Sasaran Penunjang
	Nilai SAKIP Kecamatan Total	Angka	71.34	68	68.7	69	70	71	72	
	SAKIP Kecamatan Sukoharjo	Angka	72,96	66,70	68	70	72	74	75	
4	**Kematangan Organisasi**		**35.13**	**37**	**38.87**	**41**	**43.13**	**45.13**	**47**	Indikator Sasaran Penunjang
	Kecamatan Sukoharjo	Angka	34	35	37	38	41	44	47	

Sumber : Kecamatan Sukoharjo

5.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2027

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan (Permendagri No 18 Tahun 2020 Pasal 1).

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan komitmen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, responsif, dan akuntabel. Melalui serangkaian indikator yang disusun untuk periode 2024–2030, Pemerintah Daerah menegaskan arah pembangunan kelembagaan, pelayanan publik, serta penguatan peran masyarakat dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.

Tabel 5.2. Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran Daerah dan PD/ Program Nomenklatur)	Satuan Indikator Kinerja	CAPAIAN	TARGET SUKOHARJO					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*							
1	Indeks Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah	Angka		90,00	90,50	91,00	91,50	92,00	92,50
2	Persentase aset Perangkat Daerah dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase keterisian data statistik sektoral	%	N/A	100	100	100	100	100	100
5	Nilai hasil pengawasan kearsipan	Angka		68,18	70	72	73	74	75
6	Persentase keselarasan program perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	%	100	100	100	100	100	100	100
7	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Angka	94,11	94,36	94,61	94,96	95,36	95,76	96,31
8	Persentase Keselarasan usulan di Musyawarah Desa dan Kelurahan dengan Prioritas Daerah	%	N/A	100	100	100	100	100	100
9	Persentase Kelengkapan Data Pelaporan Intervensi Stunting sesuai tata waktu yang ditentukan	%	N/A	100	100	100	100	100	100

10	Persentase Kelengkapan Data Pelaporan Intervensi Kemiskinan Sesuai Tata Waktu yang ditentukan	%	N/A	100	100	100	100	100	100
11	Persentase Desa yang Melaksanakan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Kemiskinan Tepat Waktu	%	N/A	50	55	60	65	70	75
12	Persentase Perempuan dan Masyarakat Rentan yang terlibat aktif dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah Kelurahan	%	N/A	30	30	30	30	30	30
13	Persentase Desa dan Kelurahan yang mengalokasikan dana untuk penanganan permasalahan daerah (kemiskinan, pendidikan, stunting, kelompok rentan)	%	N/A	100	100	100	100	100	100
14	Persentase Upaya Pencegahan Konflik SARA di Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100
15	Persentase Koordinasi Kejadian Kebencanaan	%	N/A	100	100	100	100	100	100
16	Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah yang dilaporkan	%	N/A	100	100	100	100	100	100
17	Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	%	N/A	100	100	100	100	100	100
18	Persentase desa yang menyelesaikan Pelaporan APBDes Tepat Waktu	%	N/A	100	100	100	100	100	100
19	Persentase Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Desa yang sudah terselenggara	%	N/A	100	100	100	100	100	100

BAB VI

PENUTUP

Rencana Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Kecamatan Sukoharjo Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukoharjo Tahun 2025–2029. Dokumen ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2027, dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan, serta arah kebijakan pembangunan Kabupaten Wonosobo sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025–2029

Ranhir Rencana Kerja Kecamatan Sukoharjo merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Kecamatan Sukoharjo selama jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2027 serta bertujuan untuk mewujudkan rencana kerja yang dijabarkan dalam dokumen rencana kerja Kecamatan Sukoharjo.

Dengan demikian, Ranhir Renja Kecamatan Sukoharjo Tahun 2027 diharapkan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang berkualitas, menuju terciptanya masyarakat Sukoharjo yang berdaya saing, sejahtera, dan berkelanjutan. Sebagai manusia kami tak luput dari kekurangan dan kekhilafan, oleh sebab itu kami membutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk kebaikan Kecamatan Sukoharjo.

Wonosobo, 30 Juli 2026

CAMAT SUKOHARJO

SETIAWAN NUGROHO, S.Sos,M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 196905281989031002